

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan yang menjadi dambaan masyarakat adalah kondisi yang sejahtera. Dengan demikian, kondisi yang menunjukkan adanya taraf hidup yang rendah merupakan sasaran utama usaha perbaikan dalam rangka perwujudan kondisi yang sejahtera tersebut. Kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya, merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menggambarkan kondisi kesejahteraan yang rendah.¹ Oleh sebab itu wajar apabila kemiskinan dapat menjadi inspirasi bagi tindakan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, upaya-upaya menanggulangi kemiskinan sampai saat ini masih dinilai belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemiskinan belum berkurang dan isu-isu ketimpangan malah semakin deras mencuat kepermukaan.² Islam merupakan pedoman kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi, politik, maupun kehidupan yang bersifat spiritual³. Sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nahl/16:89.

¹Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, cetakan kedua (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 307.

²*Ibid.*, hlm 308.

³Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 1.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَتَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ
لِّلْمُسْلِمِينَ ﴿٨١﴾

“(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”.⁴

Dalam kehidupan ekonomi Islam, umat Islam boleh menjadi orang kaya bahkan dianjurkan agar umat Islam itu tidak menjadi orang miskin, akan tetapi tidak dilarang untuk hidup sederhana.⁵ Dalam mewujudkan kehidupan ekonomi, sesungguhnya Allah SWT telah menyediakan sumber daya-Nya dan mempersilahkan manusia untuk memanfaatkannya.

Tujuan Allah menciptakan, dan mengatur semua ini adalah semata-mata agar umatnya dapat memperoleh kehidupan yang layak dan sejahtera dimuka bumi ini, kemudian juga agar manusia dapat memenuhi segala kebutuhannya baik yang bersifat *daruriah* maupun *hajiyat*. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan disyariatkannya hukum Islam, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Hal ini disebutkan secara jelas dalam QS. al-Anbiya’/21:107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧٧﴾

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: PT. Insan Madia Pustaka, 2012), hlm. 277.

⁵Akhmad Mujahidin, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Pekanbaru: Pascasarjana UIN SUSKA Riau, 2007), hlm. 17.

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.⁶

Berawal dari surat tersebut maka kita sebagai masyarakat tidak semestinya berpangku tangan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan, masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa dan Negara serta membutuhkan kerja keras yang terorganisasi untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Di Indonesia, pentingnya peran Negara dalam membangun dan mengimplementasikan kebijakan publik dibidang kesejahteraan rakyat dilandasi oleh perspektif historis, ideologis, logis dan universal. Sebagaimana yang di kemukakan oleh; Edy Suharto, sebagai berikut:

1. Secara historis, pendiri bangsa memilih model Negara kesejahteraan dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Secara ideologis, sila-sila dalam pancasila menegaskan kerinduan Indonesia akan adanya keadilan sosial bagi segenap warga.
3. Secara logis, Indonesia adalah Negara yang berpenduduk lebih dari dua ratus juta jiwa, dengan separuh (untuk tidak menyatakan seberapa besar) warganya masih terhimpit kemiskinan, kebodohan dan ketelantaran. Karenanya sangat *absurd* jika negeri ini tidak membutuhkan ketelibatan Negara dalam memajukan kesejahteraan rakyatnya.

⁶Kementerian Agama RI, *op.cit.*, hlm. 331.

4. Secara universal, tidak ada sistem pemerintahan di dunia ini yang tidak memberikan peran kepada Negara untuk menjalankan pembangunan kesejahteraan sosial.⁷

Keterlibatan Pemerintah dalam menyikapi fenomena kemiskinan sangatlah strategis karena diperlukan suatu kebijakan yang dapat melahirkan suatu program/kegiatan pembangunan secara terpadu antar pertumbuhan dan pemerintah, termasuk didalamnya upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih mampu menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan merubah pola pikir serta sikap mental mereka.

Melihat kesejahteraan sosial Indonesia, sudah semestinya jika para Pemimpin/Pemerintah pembuat kebijakan, dan siapa saja yang tergerak membangun Indonesia untuk menengok kembali dan memperkuat konsep manajemen berdasarkan tujuan bernegara untuk merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan di Negara tercinta ini. Adapun strategi percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 3 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.⁸

⁷Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik-Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare) Di Indonesia*, Cet.1 (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 9.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Indonesia sesungguhnya merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu terciptanya kesejahteraan serta kemandirian masyarakat yang berkelanjutan yang adil dan makmur, Sebagai mana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 Ayat (4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”⁹

Sejatinya Indonesia adalah Negara menganut faham Negara kesejahteraan (*welfare state*) dengan model Negara Kesejahteraan Partisipatif (*participatory welfare*) yang dalam *literature* pekerjaan sosial dikenal dengan dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan atau *welfare pluralism*. Model ini menekankan bahwa Negara harus tetap ambil bagian dalam penanggulangan masalah sosial seperti penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan jaminan sosial lainnya, meskipun dalam operasionalnya tetap melibatkan masyarakat. Cita-cita tersebut dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam bentuk operasional penyelenggaraan pemerintahan yang selaras dengan fenomena dan dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial masyarakat sering diartikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk

⁸Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Perpres No. 15 Tahun 2010, Ps. 3.*

⁹*Ibid*

¹⁰Edi Suharto, *op.cit.*, hlm. 56.

kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan.

Menuntaskan kemiskinan masyarakat bukan suatu hal yang mudah, kemiskinan tidak akan berubah secara signifikan jika pemerintah atau para pemegang kekuasaan/jabatan tidak melakukan hal yang mendasar. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Selama ini Pemerintah telah berupaya meluncurkan berbagai program untuk memberdayakan masyarakat miskin di Indonesia, tetapi dalam tataran implementasi, program yang bertujuan memberdayakan masyarakat miskin itu tidak menyelesaikan persoalan, tetapi justru melahirkan tindakan korupsi gaya baru.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat

ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

(PNPM-MPd) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang target sarannya adalah masyarakat pedesaan. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir dan kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah pedesaan.

Desa Bincau Kecamatan Martapura merupakan salah satu desa di kecamatan Martapura yang memperoleh bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) sejak tahun 2009. Mengacu dari permasalahan dalam pengentasan kemiskinan tersebut, maka penulis mencoba untuk menelusuri dan mengidentifikasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) dalam kaitannya sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan pembangunan di wilayah pedesaan. Maka, dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul **“Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPd di Kecamatan Martapura”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Martapura?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Martapura?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implementasi dari pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Martapura khususnya Desa Bincau.
2. Mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Martapura khususnya Desa Bincau.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data bahan penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan guna mencapai tujuan studi program strata satu (S1) pada Fakultas Syariah jurusan Ekonomi Syariah.
2. Secara teoritis ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan ekonomi. Khususnya mengenai penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Martapura,

sebagai bentuk kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

3. Secara praktis untuk menjadikan masukan bagi seluruh komponen masyarakat beserta pemerintah tentang eksistensi penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) khususnya di Kecamatan Martapura dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh di lingkungan Kecamatan Martapura.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian terarah serta penelitian ini tidak menimbulkan interpretasi yang sangat luas mengingat banyaknya istilah PNPM Mandiri yang dilengkapi dengan akronim sektoral. Maka ruang lingkup penelitian pembahasan ini dibatasi hanya membahas tentang :

1. Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai:
 - a. Tujuan kegiatan yang akan dicapai
 - b. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan
 - c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui
 - d. Strategi pelaksanaan.

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperationalkan.¹¹ Program yang dimaksud dalam penelitian ini

¹¹USU Institutional Repository,

adalah segala kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah demi menunjang perekonomian masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa.

2. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep Pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan. Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat (khususnya yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan) didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka.¹²

Pada aspek lain, pemberdayaan sangat terkait dengan kemitraan yaitu melibatkan unsur-unsur yang memiliki status sejajar dalam perumusan kebijakan pembangunan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dimaknai bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proposional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategis untuk mencapai suatu pembangunan dalam jangka panjang, dan dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat desa Bincau Kecamatan Martapura.

3. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan

<http://repository.usu.id/bitstream/123456789/29235/3/Capter%20Iipdf>, (18 Maret 2017).

¹²Agus Sarjono dan Trilaksono Nograo, *Paradigma, Model Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat Diera Otonomi Daerah*, (Malang : Fiaunibraw, 2007), hlm. 26-27.

melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.¹³ Dalam hal ini yang akan diteliti adalah PNPM-MPd yang merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah Pedesaan. PNPM Mandiri Pedesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.¹⁴

F. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah berusaha melakukan beberapa penelusuran terhadap berbagai karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, karya ilmiah dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Syukron Munjazi dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan Melalui PNPM Mandiri (Studi Kasus Implementasi di Kelurahan Demangan, Gondokusuman,

¹³ UPK BONTONOMPO SELATAN, <https://pnpmbonsel.wordpress.com/2010/10/25/pengertian-dan-tujuan-pnpm-mandiri-Pedesaan/>, (08 November 2016).

¹⁴Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan, (08 November 2016).

Yogyakarta). Dalam hasil studinya diperoleh data bahwa program PNPM Mandiri di wilayah Kelurahan Demangan telah diimplementasikan dengan mengacu pada konsep pemberdayaan masyarakat partisipatoris. Masyarakat ikut terlibat secara aktif dalam mengawal program-program pemberdayaan masyarakat, yang dimulai dari sosialisasi, refleksi, pemetaan, hingga pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun bentuk dari partisipasinya adalah bentuk partisipasi transformasional yang mana bentuk partisipasi ini menjadikan masyarakat dan pihak luar bersama-sama menjadi subjek sekaligus objek dari program-program pemberdayaan tersebut.¹⁵ Dari segi konsep penelitian memiliki kesamaan hanya saja yang membedakan adalah didalam penelitian yang disusun oleh penulis mengenai Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Martapura yang ditinjau dari ekonomi Islam.

Penelitian lain yang berupa skripsi yang memuat tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) adalah skripsi berjudul “Peran PNPM Mandiri Pariwisata dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan” yang disusun oleh Firmansyah Nurul Huda, dalam skripsi tersebut mengkaji peran masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi melalui kegiatan-kegiatan kepariwisataan.¹⁶ Berbeda dengan

¹⁵Syukron Munjazi, “Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi Kasus Implementasi di Kelurahan Demangan, Gondokusuman Kota Yogyakarta)” (*Skripsi tidak diterbitkan, skripsi Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010*).

¹⁶Firmansyah Nurul Huda, “Peran PNPM Mandiri Pariwisata dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan”, (*skripsi tidak diterbitkan, skripsi mahasiswa jurusan sosiologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012*).

skripsi yang akan disusun oleh penulis akan mengkaji Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd).

Kajian terhadap berbagai macam mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) memang telah banyak dilakukan oleh banyak kalangan, pemikir maupun mahasiswa. Namun, sejauh yang penulis ketahui, secara spesifik belum pernah ada kajian penelitian mengenai Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd). Untuk itu, menurut penulis penelitian ini layak dilakukan dalam rangka menambah pengetahuan tentang Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) khususnya di Kecamatan Martapura Desa Bincau.

G. Sistematika Penelitian

Untuk terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis membagi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah yang menguraikan gambaran dari permasalahan yang akan diteliti serta alasan dari pemilihan judul. Kemudian dirumuskanlah permasalahan penelitian dan ditetapkan tujuan penelitian yang sesuai hasil penelitian. Definisi operasional berisikan penjelasan kosakata-kosakata yang ada pada judul penelitian, yang masih memerlukan penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Kemudian sebagai rujukan, maka

diambil kajian pustaka berdasarkan skripsi-skripsi terdahulu, jurnal, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti agar memudahkan penulisan dan menjaga kebenaran keaslian penulisan, dan untuk memudahkan memahami penelitian ini maka disusunlah sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, merupakan bab yang berisikan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yang dijadikan sebagai acuan untuk menganalisis data yang diperoleh. Bab ini berisi tentang Problematika kemiskinan, pengertian, tujuan, prinsip-prinsip dan pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan dan tinjauan ekonomi Islam mengenai program pemerintah tersebut.

Bab III Metode Penelitian, metode penelitian merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, berisikan laporan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum penyaji data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup, pada bab ini meliputi kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran terhadap hasil analisis dan pembahasan.